



**LAPORAN HASIL RAPAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA SATKER PUSKEU POLRI TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Pendahuluan Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses permintaan tunjangan kinerja serta memberikan kemudahan bagi 1443 satuan kerja (Satker) di lingkungan Polri, telah dikembangkan sebuah inovasi layanan berbasis digital. Layanan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan tunjangan kinerja dan memberikan akses yang lebih transparan terhadap rincian penghasilan yang diterima oleh personel Polri, termasuk gaji dan tunjangan kinerja.

B. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga yang telah diubah dengan PMK Nomor 20 Tahun 2023;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Polri;

C. Tujuan Inovasi Inovasi ini bertujuan untuk:

1. Mempermudah dan mempercepat proses permintaan tunjangan kinerja bagi 1443 Satker.
2. Menyediakan layanan transparan bagi personel dalam mengecek rincian gaji dan tunjangan kinerja.
3. Mengurangi potensi kesalahan dalam proses administrasi keuangan.
4. Mengintegrasikan data secara real-time antara sistem penggajian, tunjangan, dan administrasi Polri.

D. Solusi Inovatif Inovasi yang diterapkan mencakup:

1. Aplikasi Digital Terpadu: Platform berbasis web dan mobile yang memungkinkan pengajuan tunjangan kinerja secara online.
2. Sistem Otomasi Verifikasi: Pemadanan data otomatis antara permintaan tunjangan kinerja dengan data administrasi keuangan.
3. Dashboard Transparansi Penghasilan: Menyediakan akses bagi personel untuk melihat rincian penghasilan secara real-time.
4. Integrasi dengan SIPP dan Puskeu Presisi: Memastikan bahwa data yang digunakan selalu terkini dan valid.
5. Implementasi Aplikasi Jitu Presisi Polri: Sebagai bagian dari transformasi digital menuju Zona Integritas WBBM.

E. Implementasi dan Manfaat

1. Efisiensi Waktu: Proses yang sebelumnya memakan waktu hingga beberapa minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari.
2. Akses Mudah dan Cepat: Personel dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital.
3. Transparansi yang Lebih Baik: Dengan adanya dashboard penghasilan, personel dapat memahami rincian gaji dan tunjangan kinerja yang mereka terima tanpa harus menunggu pencetakan slip gaji manual.
4. Akurasi Data: Mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan data tunjangan kinerja.

F. Kegiatan dan Pelaksanaan

Sebagai bagian dari implementasi inovasi, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan menggunakan aplikasi Jitu Presisi Polri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring melalui Zoom dalam satu hari pada tanggal 11 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh operator Satker memahami proses pengajuan tunjangan kinerja, penggunaan dashboard transparansi, serta pemanfaatan sistem otomatisasi verifikasi data.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi Inovasi

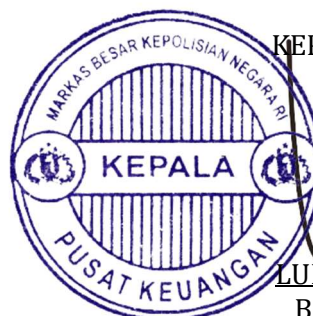
layanan ini telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Polri. Ke depan, pengembangan lebih lanjut dapat mencakup:

1. Peningkatan fitur keamanan data untuk menjaga privasi dan integritas informasi personel.
2. Penggunaan teknologi AI untuk analisis prediktif dalam pengelolaan tunjangan dan gaji.
3. Integrasi lebih luas dengan sistem keuangan negara untuk mempercepat pencairan dana.

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan proses administrasi keuangan di lingkungan Polri menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 11 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA SATKER PUSKEU POLRI TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Polri yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam



mewujudkan good governance dan clean government menuju aparaturnya Polri yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima kepolisian serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Kegiatan ini merupakan perubahan yang ingin dibangun di lingkungan Puskeu Polri. Setelah kegiatan ini diharapkan seluruh staf untuk saling mengingatkan, bantu membantu, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Employee engagement antara bidang pada Satker Puskeu Polri diharapkan bekerja secara optimal, buat

inovasi

inovasi yang baik untuk kemajuan organisasi sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal.

2. Dasar

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/265/II/2021 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri;
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satker Puskeu Polri Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-060.01.1.642381/2022 tanggal 17 November 2021.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri Tahun 2022.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan dibuatnya laporan ini adalah sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan sekaligus sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan selanjutnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi hasil pelaksanaan Pencanangan Pembangunan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri Tahun 2022 pada tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 2022.



5. Tata Urut

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PELAKSANAAN

BAB III : HASIL YANG DICAPAI

BAB IV : PENUTUP

II. PELAKSANAAN

6. Waktu

Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri Tahun 2022 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Februari 2022.

7. Tempat

Tempat pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri Tahun 2022 di Hotel Hilton Bali Resort Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, Badung Bali.



8. Peserta

8. Peserta yang mengikuti Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah para pejabat utama Satker Puskeu Polri dan perwakilan eksternal yang mendukung Satker Puskeu Polri dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM.



9. Kegiatan

- a. pembukaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri Tahun 2022 oleh Kapuskeu Polri Brigjen Pol. Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H. sekaligus memberikan arahan tentang Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);



- b. penandatanganan Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan WBBM oleh Kapuskeu dan seluruh pejabat utama Puskeu Polri;
- c. penandatanganan Piagam Pencanangan WBBM dari pihak eksternal dan



Stakeholder yaitu oleh Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si, Irwasda Polda Bali Kombes Pol. Awang Joko Rumitro, S.I.K., M.Si., Kasubbag

Umum KPPN Denpasar Arif Kurniawan, Kepala NPKP Bali Muhammad

Masykur, perwakilan dari Bank Mandiri Bapak Winardi, Bank BRI Bapak Andra RM, Bank BNI Bapak Agus Indrawan dan Bank BTN Ibu Liliana P.

III. HASIL YANG DICAPAI

10. Sesuai dengan keputusan Kemenpan RB Nomor 1472 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021, Satker Puskeu Polri berhasil memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada T.A. 2021.



11. Dipilihnya Satker Pusat Keuangan Polri sebagai zona integritas menuju WBBM Tahun 2022 karena telah memenuhi beberapa syarat, antara lain : telah predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), memiliki peran dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis dan dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik.



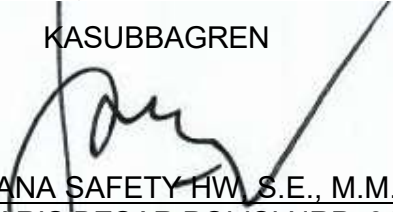
12. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri Tahun 2022 telah ditandatangani Pakta Integritas dan Piagam Pencanaan WBBM baik oleh pihak internal maupun internal.

IV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker Puskeu Polri Tahun 2022 dibuat sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang dibebankan sekaligus sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 23 Februari 2022

KASUBBAGREN



Dr. DIANA SAFETY HW, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 64090676